

STRUKTUR DAN TATANAN SISTEM PARIWISATA

NUR ENDAH JANUARTI

Tujuan Pembelajaran

- Mahasiswa mampu memahami tinjauan kebijakan pariwisata
- Mahasiswa mengidentifikasi interaksi wisatawan dengan masyarakat lokal

TINJAUAN KEBIJAKAN PARIWISATA

Mari ingat kembali

Unsur Pariwisata :

- Manusia → wisatawan (unsur sebagai pelaku kegiatan pariwisata)
- Tempat → DTW (unsur fisik mencakup kegiatan/atraksi)
- Waktu (unsur tempo yang dihabiskan dalam perjalanan dan selama berdiam di tempat tujuan)

Mari ingat kembali

- **Pariwisata sebagai Sektor Industri**

Turut memberi andil dalam pembangunan sosial dan ekonomi, baik negara maju atau sedang berkembang, maka **badan usaha dan organisasi** dalam pariwisata dapat dianggap sebagai suatu kesatuan

KEBIJAKAN PARIWISATA

KEBIJAKAN

- Kebijakan (*policy*) : arah atau tuntunan dalam pelaksanaan suatu kegiatan oleh pemerintah yang diwujudkan dalam sebuah pernyataan umum mengenai tujuan yang ingin dicapai
- Kebijakan terkait dengan Perencanaan (*planning*) → tujuan, strategi, evaluasi

KEBIJAKAN PARIWISATA

Goeldner dan Ritchie (2006) : kebijakan pariwisata adalah **regulasi**, aturan, pedoman, arah, dan sasaran pembangunan/promosi serta **strategi** yang memberikan kerangka dalam pengambilan keputusan individu maupun kolektif yang secara langsung mempengaruhi **pengembangan pariwisata** dalam jangka panjang dan sekaligus kegiatan sehari-hari yang berlangsung di suatu destinasi.

KEBIJAKAN PARIWISATA

Biederman (2007) : kebijakan kepariwisataan harus **menjamin** negara maupun daerah mendapatkan **manfaat** yang sebesar-besarnya dari kontribusi sosial dan ekonomi yang diberikan pariwisata. Sasaran akhir dari kebijakan pariwisata adalah peningkatan kemajuan negara atau daerah dan kehidupan warga negaranya.

PERKEMBANGAN PARIWISATA

- Perubahan paradigma pariwisata terjadi seiring pengaruh perkembangan industri.

Pariwisata (*mass tourism*) → pariwisata alternatif (*alternative tourism*)

Tahap Perkembangan Pariwisata

1. Pariwisata Massal

→ target pencapaian jumlah wisatawan sebesar- besarnya, pencapaian pendapatan pariwisata yang sebesar – besarnya, dan penciptaan lapangan kerja disektor pariwisata

2. Pariwisata Kesejahteraan Sosial

→ Peran pariwisata mulai digeser ke pencapaian kesejahteraan sosial, bukan lagi pada pertumbuhan ekonomi semata

3. Pariwisata Terpadu (holistik)

→ Kemitraan antara pemerintah, swasta, dan lembaga swadaya masyarakat. Mulai disadari bahwa sisi persaingan memegang peran menentukan dalam industri pariwisata.

Pembangunan Pariwisata

- Untuk mencapai pengembangan pariwisata holistik maka memerlukan kebijakan dan perencanaan yang sistematis.
- Keterlibatan pemerintah dilakukan mempersiapkan infrastruktur, penggunaan tanah atau tata ruang, pengelolaan sistem pariwisata

Peran Kebijakan Pemerintah

1. Membangun kerangka (framework) operasional menyangkut sektor publik dan swasta yang terlibat dalam menggerakkan pariwisata.
2. Menyediakan dan memfasilitasi kebutuhan legislasi, regulasi dan kontrol yang diterapkan dalam pariwisata, perlindungan lingkungan dan pelestarian budaya serta warisan budaya.
3. Menyediakan dan membangun infrastruktur transportasi darat, laut dan udara dengan kelengkapan prasarana komunikasi.

Peran Kebijakan Pemerintah

4. Membangun dan memfasilitasi peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan menjamin pendidikan dan pelatihan yang profesional untuk menyuplai kebutuhan tenaga kerja disektor pariwisata.
5. Menerjemahkan kebijakan pariwisata yang disusun kedalam rencana kongkret

KEBIJAKAN PARIWISATA DI INDONESIA

KEBIJAKAN PARIWISATA DI INDONESIA

Jaminan hukum : Undang-undang Nomor 10 tahun 2009
Tentang Kepariwisataan

UU No 10 tahun 2009

- Beberapa ketentuan : Wisata, wisatawan, pariwisata, kepariwisataan, daya tarik wisata, DTW, Usaha Pariwisata, Pengusaha Pariwisata, Industri Pariwisata, Kawasan Strategis Pariwisata, Sertifikasi

KEBIJAKAN PARIWISATA DI INDONESIA

- Pariwisata : berbagai macam kegiatan wisata dan **didukung** berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh **masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah**
- Tanggungjawab pariwisata pada beberapa **stakeholder**

Tujuan Pariwisata

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi
- b. meningkatkan kesejahteraan rakyat
- c. menghapus kemiskinan
- d. mengatasi pengangguran
- e. melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya
- f. memajukan kebudayaan
- g. mengangkat citra bangsa
- h. memupuk rasa cinta tanah air
- i. memperkuat jati diri dan kesatuan bangsa
- j. mempererat persahabatan antarbangsa

Prinsip Pengembangan Pariwisata

- a. menjunjung tinggi **norma agama dan nilai budaya** sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan;
- b. menjunjung tinggi **hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal**;
- c. memberi manfaat untuk **kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan, dan proporsionalitas**;
- d. memelihara **kelestarian alam dan lingkungan hidup**

Prinsip Pengembangan Pariwisata

- e. **memberdayakan** masyarakat setempat;
- f. menjamin **keterpaduan** antarsektor, antardaerah, antara pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antarpemangku kepentingan;
- g. mematuhi **kode etik** kepariwisataan dunia dan kesepakatan internasional dalam bidang pariwisata; dan
- h. memperkuat **keutuhan** Negara Kesatuan Republik Indonesia.

KODE ETIK PARIWISATA DUNIA

(World Tourism Organization)

1. **Kontribusi** pariwisata dan saling **menghormati** antarmanusia dan masyarakat
2. Pariwisata sebagai **media** untuk memenuhi kebutuhan kualitas hidup baik perseorangan maupun kolektif
3. Pariwisata sebagai **sektor pembangunan** yang berkelanjutan
4. Pariwisata sebagai **pemakai warisan budaya** kemanusiaan serta sebagai penyumbang **pengembangan warisan budaya** itu sendiri
5. Pariwisata adalah kegiatan **menguntungkan** bagi masyarakat dan negara penerima wisatawan

KEWAJIBAN PEMANGKU KEPENTINGAN PENGEMBANG PARIWISATA

1. Memenuhi hak dasar berwisata
2. Kebebasan bergerak wisatawan
3. Hak pekerja dan pengusaha dalam industri pariwisata
4. Melaksanakan prinsip dasar kode etik pariwisata dunia
5. Menyediakan informasi objektif dan jujur
6. Menunjukkan perhatian
7. Membantu memenuhi kebutuhan aspek budaya dan spiritual

KEWAJIBAN PEMANGKU KEPENTINGAN PENGEMBANG PARIWISATA

8. Bekerjasama dengan pelaku usaha pariwisata terkait dan asosiasinya
9. Pemerintah bertanggungjawab mengeluarkan informasi akan suatu keadaan yang sulit atau berbahaya
10. Media menyampaikan informasi jujur

HAK DASAR WISATA

1. Memenuhi secara langsung, pribadi untuk mengenal dan menikmati kekayaan bumi
2. Melakukan wisata sebagai hak dasar untuk beristirahat dan mengisi waktu luang → hubungannya dengan pengaturan jam kerja → Deklarasi Universal HAM → hak ekonomi, sosial, budaya
3. Pariwisata sosial → memberi kesempatan luas kepada kelompok untuk mengisi waktu luang, perjalanan yang didukung pemerintah
4. Wisata keluarga, pemuda, mahasiswa, warga lanjut usia dan penderita cacat harus diberi dorongan dan dibantu pertumbuhannya